

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta telah banyak dilakukan. Mulai dari upaya pengawasan yang dilakukan masing-masing unit kerja, penyediaan fasilitas penunjang untuk mencegah korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil seperti pemasangan CCTV dan juga tersedianya ruangan pelayanan system satu pintu. Selain itu Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta juga akan menindak Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dengan melakukan penutupan portal kepegawaian.
2. Hambatan yang dihadapi Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta dalam upaya pencegahan korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu diperlukan adanya pemeliharaan fasilitas-fasilitas penunjang seperti CCTV. Selain itu Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta tidaklah menghadapi hambatan yang berarti dalam upaya sosialisasi pencegahan korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal itu terlihat dari bagaimana upaya-upaya yang gencar dilakukan oleh Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Dan juga bagaimana antusiasme dari Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti upaya pencegahan korupsi.

V.2 Saran

Saran penulis mengenai peran Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta dalam pencegahan korupsi bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu:

1. Melihat banyaknya upaya yang dilakukan Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara Jakarta dalam pencegahan korupsi, maka penulis menyarankan hal itu harus terus-menerus dilakukan dan juga

tetap melakukan peningkatan dan perbaikan demi tercapainya lingkungan yang bebas dari korupsi.

2. Melihat dari kondisi Pegawai Negeri Sipil yang terlibat Tindak Pidana Korupsi, perlu juga diperhatikan hukuman yang layak bagi setiap pelaku. Karena banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat hanya karena menerima aliran dana atas perintah atasan. Jadi perlu adanya perbedaan hukuman antara pelaku utama korupsi dengan pelaku yang hanya menerima arahan. Selain hal itu, dilihat dari kondisi Pegawai Negeri Sipil, terjadi adanya perbedaan tunjangan antara Pegawai Negeri Sipil yang berada di tingkat pusat dengan Pegawai Negeri Sipil yang berada di daerah. penulis menyarankan Pemerintah melakukan pemerataan terhadap tunjangan tersebut agar terciptanya kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil.

